

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi ialah sebuah tahap yang didalamnya terdapat pemerintah dan semua sektor masyarakat untuk mendayagunakan sumber daya yang tersedia, membuka peluang kerja, meningkatkan aktivitas perekonomian, dan mendorong perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan wilayah yakni alat strategis yang digunakan dalam pembangunan nasional, khususnya di negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang menghadapi ketidaksetaraan. Pembangunan wilayah termasuk salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, terutama bagi negara berkembang yang mempunyai karakteristik geografis luas dan heterogen seperti Indonesia. Pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah makin melebar,

Dalam penelitian (Hadju et al., 2021) menjabarkan ketimpangan pada dasarnya muncul akibat perbedaan potensi sumber daya alam kondisi demografi antar wilayah, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan dan penanganan pembangunan. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah merupakan konsekuensi struktural dari proses pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Dalam konteks global, *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memerangi ketidaksetaraan,

memastikan perlindungan alam dan sumber dayanya, dan menciptakan kondisi demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta berkeadilan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni agenda pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi di masa depan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Handrian & Andry, 2020). Diantara 17 tujuan yang ditetapkan dalam SDGs, Goal 10 yakni "*Reducing Inequalities*" atau "Pengurangan Kesenjangan" menjadi salah satu prioritas strategis dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Pengurangan ketimpangan antar wilayah merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang yang menghadapi disparitas spasial tinggi. Tujuan dan target SDGs secara eksplisit diarahkan untuk mewujudkan Pembangunan yang mampu mengurangi kemiskinan dan kelaparan serta upaya mengurangi kesenjangan baik di dalam negeri maupun antarnegara, meningkatkan pengelolaan air dan energi, dan mendorong upaya penanganan perubahan iklim (Handrian & Andry, 2020).

Teruntuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan perekonomian daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara daerah maju dan daerah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diupayakan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Selain menjadi indikator keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong

pemerataan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penurunan pengangguran, dan peningkatan daya beli. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berdampak optimal terhadap kesejahteraan apabila berlangsung secara berkualitas dan inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat terdistribusi secara adil dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penelitian (Sultan et al., 2023) memperlihatkan bahwa indikator kesejahteraan, seperti inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang menegaskan adanya keterkaitan statistik antara kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif berperan dalam menciptakan lapangan kerja, menekan pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dapat meningkat. Peningkatan aktivitas ekonomi juga mendorong bertambahnya penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan antar wilayah.

Di Indonesia, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi permasalahan struktural yang berlangsung secara berkelanjutan dan tampak jelas secara spasial. Wilayah Indonesia bagian barat relatif lebih maju akibat tingginya konsentrasi investasi, ketersediaan infrastruktur, dan aktivitas industri, sementara wilayah timur dan kawasan kepulauan cenderung mengalami keterlambatan pembangunan. Tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah umumnya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan besaran penghasilan yang tercermin pada

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbedaan ting-kat PDRB antar wilayah yang berkembang tidak merata mencerminkan adanya ketidaksetaraan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Rata-rata PDRB perkapita dari 38 Provinsi di Indonesia mencapai 78,6 juta rupiah. Dari hasil rata-rata tersebut hanya 4 provinsi yang memiliki PDRB perkapita di atas rata-rata yakni DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau dan Papua Barat, sisanya sebanyak 34 Provinsi masih mempunyai PDRB dibawah rata-rata nasional.

Nilai tambah ekonomi di Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu, sementara daerah lain bergantung pada sektor primer berproduktivitas rendah. Disparitas pembangunan tercermin dari perbedaan kontribusi PDRB dan kesenjangan pendapatan antarprovinsi, di mana Pendapatan daerah per kapita, investasi, dan tingkat pengangguran memengaruhi secara nyata ketidakseimbangan pembangunan regional (Rachmawati et al., 2025). Pemusatan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu menjadi faktor penting yang memperparah ketimpangan pembangunan nasional.

Akumulasi investasi dan pertumbuhan sektor industri di pusat-pusat ekonomi mendorong arus tenaga kerja dan modal ke wilayah tersebut, sementara daerah pedalaman dan kawasan timur Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kesempatan kerja. Fenomena aglomerasi ini menyebabkan wilayah yang lebih maju mampu meningkatkan PDRB dan menarik investasi domestik maupun asing secara berkelanjutan, sehingga kesenjangan antara wilayah inti dan ping-giran makin melebar. Dampak ketimpangan ini bukan sekedar tercermin pada distribusi pendapatan, melainkan pada perbedaan kualitas hidup serta capaian Indeks Pembangunan Manusia

antar wilayah. Di dalam merespons kondisi ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan penanganan daerah tertinggal se-bagai upaya pemerataan pembangunan melalui instrumen perencanaan nasional, seperti RPJMN, dan penerapan kebijakan afirmatif berbasis wilayah.

Daerah tertinggal merupakan wilayah di Indonesia yang tingkat pembangunannya relatif lebih rendah diperbandingkan daerah lain yang ditandai oleh lemahnya kinerja perekonomian, kualitas SDM, tersedianya sarana prasarana, kemampuan fiskal daerah, kemudahan akses, dan kondisi khas suatu wilayah tertentu. Wilayah ini umumnya masuk ke golongan Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang menjadi prioritas percepatan pembangunan oleh pemerintah.

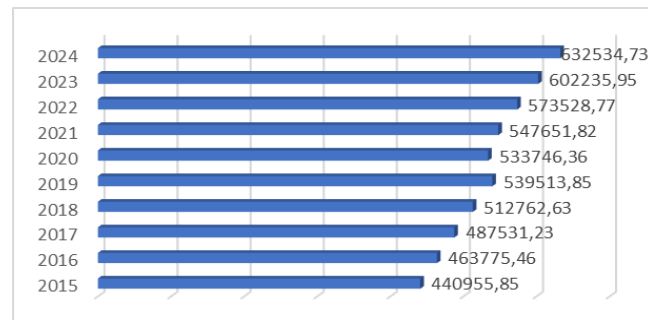
Pemerintah mewajibkan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui PP No 78 Th 2014 yang kemudian diimplementasikan melalui Keppres No 131 Tahun 2015 dengan menetapkan 122 kabupaten tertinggal periode 2015–2019, dan Keppres No 63 Tahun 2020 yang menetapkan 62 kabupaten tertinggal untuk periode 2020–2024. Daerah tertinggal tersebut tersebar di beberapa provinsi, antara lain Sumut, Sulteng, Maluku, Papua, dan Papua Barat, dengan penetapan yang didasarkan pada indikator ekonomi, kualitas SDM, infrastruktur, aksesibilitas, kapasitas fiskal, dan karakteristik daerah (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020).

Penetapan daerah tertinggal oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal didasarkan pada kriteria ekonomi, SDM, fasilitas, kecakapan finansial, tingkat keterjangkauan, dan ciri-ciri wilayah, dengan pendekatan pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keamanan

(Hasyimi et al., 2023). Ketertinggalan daerah di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini dikarenakan oleh rendahnya kinerja perekonomian juga oleh keterbatasan prasarana, akses layanan dasar, kualitas SDM, dan kemampuan keuangan daerah yang berdampak pada rendahnya daya saing dan peluang pembangunan. Penanganan daerah tertinggal memerlukan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, kondisi sosial, dan kelembagaan, dan tidak berfokus pada satu sektor saja.

Sebagian daerah tertinggal berada di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai karakteristik geografis beragam dan strategis sehingga memengaruhi pola pembangunan wilayah serta aktivitas ekonomi regional. Provinsi ini terletak di bagian barat Indonesia dan langsung berbatasan dengan Selat Malaka, salah satu lintasan perdagangan internasional paling padat yang memberikan keunggulan lokasi bagi pengembangan sektor perdagangan, industri, dan logistik. Secara wilayah, Sumatera Utara mencakup kawasan pantai timur yang relatif datar dan berkembang pesat, kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan topografi berbukit hingga bergunung, dan kawasan pantai barat dan kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.

Gambar 1.1 PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Pada tahun 2015-2024 Atas Dasar Harga Konstan (Milyar)



Sumber : (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2024)

Mengacu kepada grafik PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan periode 2015–2024, dapat diinterpretasikan bahwa perekonomian memperlihatkan tren pertumbuhan jangka panjang yang positif dan berkelanjutan, meskipun sempat mengalami tekanan pada masa tertentu. Nilai PDRB meningkat secara konsisten dari sekitar Rp440.955,85 M di 2015 jadi Rp632.534,73 M saat 2024 yang mencerminkan adanya peningkatan kapasitas produksi riil dan ekspansi aktivitas ekonomi daerah secara agregat.

Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan ini menandakan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat riil, bukan semata-mata akibat kenaikan harga (inflasi), sehingga mencerminkan perbaikan fundamental struktur ekonomi daerah. Dinamika PDRB memperlihatkan adanya perlambatan pada periode 2020 yang ditandai dengan penurunan diperbandingkan tahun 2019. Kondisi tersebut berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor-sektor utama seperti perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan pariwisata. Grafik memperlihatkan bahwa perekonomian Sumatera Utara relatif resilien, tercermin dari pemulihan yang cukup cepat sejak tahun 2021, di mana PDRB kembali meningkat secara

ber-tahap hingga melampaui capaian sebelum pandemi. Itu mengindikasikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi dan peran sektor unggulan mampu mendorong *rebound* ekonomi daerah.

Peningkatan PDRB Sumatera Utara selama satu dekade terakhir memperlihatkan perbaikan kinerja ekonomi regional, namun juga menegaskan perlunya struktur ekonomi yang lebih inklusif dan merata antar wilayah. Pertumbuhan PDRB perlu diimbangi dengan pemerataan kontribusi antar sektor dan daerah sesuai karakteristik wilayah. Temuan ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan Pembangunan daerah yang bukan hanya berfokus pada peningkatan output, melainkan pemerataan manfaat pembangunan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah. (Dea & Kaleka, 2023) menegaskan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah memerlukan kerja sama antar sektor pembentuk ekonomi agar saling mendorong dan mendukung setiap aktivitas Pembangunan secara selaras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian (Puspita & Imsar, n.d.) pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Utara masih tidak merata di antara kabupaten dan kota. Sementara daerah pedesaan dan kepulauan seperti Nias dan Mandailing Natal masih dianggap tertinggal, sebagaimana terlihat dari perbedaan mencolok dalam PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan seperti Medan, Deli Serdang, dan Binjai, didukung oleh infrastruktur yang memadai, kegiatan perdagangan, dan investasi yang relatif besar. Di lokasi perkotaan seperti Medan, Deli Serdang, dan Binjai, pertumbuhan ekonomi bi-

asanya lebih tinggi karena infrastruktur yang cukup, perdagangan, dan investasi yang relatif besar. Seperti yang terlihat dari perbedaan mencolok dalam PDRB per kapita dan IPM antara daerah-daerah ini, daerah pedesaan dan kepulauan seperti Nias dan Mandailing Natal masih dianggap tertinggal.

Perpres No 13 Th 2012 terkait Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera serta Perda Prov Sumut No 2 Tahun 2017 terkait Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara 2017–2037 yang menetapkan bahwa Sumut digolongkan jadi empat wilayah pembangunan dengan sektor unggulan masing-masing, seperti berikut:

Gambar 1.2 Pembagian Wilayah Pembangunan di Sumatera Utara



Sumber : (Peraturan Daerah Sumatera Utara, 2017)

Gambar tersebut menunjukkan pembagian wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang terbagi ke dalam empat wilayah utama berdasarkan karakteristik dan sektor unggulannya. Wilayah Metropolitan Mebidangro yang meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo difokuskan pada sektor industri, perdagangan, jasa, serta kawasan

ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Wilayah Pertanian Dataran Tinggi dan Food Estate, yang mencakup daerah Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya, diarahkan pada pengembangan pertanian, perkebunan, serta hortikultura sebagai basis ketahanan pangan. Selanjutnya, Wilayah Pantai Barat dan Lautan yang meliputi Kepulauan Nias, Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal memiliki keunggulan pada sektor perikanan, kelautan, serta wisata bahari. Sementara itu, Wilayah Danau Toba dan Kawasan Pariwisata, yang mencakup Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan wilayah sekitar Danau Toba, difokuskan pada pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta jasa akomodasi, sehingga keseluruhan pembagian wilayah ini saling melengkapi dalam mendorong pembangunan ekonomi Sumatera Utara secara terintegrasi.

Meskipun Provinsi Sumatera Utara telah mempunyai kebijakan tata ruang wilayah, masih terdapat daerah yang tergolong tertinggal, khususnya Kepulauan Nias. Kepulauan Nias merupakan wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan utama Pulau Sumatera dan termasuk dalam Wilayah Pantai Barat dan Bahari dengan karakteristik pesisir dan kepulauan. Seluruh kabupaten di Kepulauan Nias, yakni Kab Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan, masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal, sementara Kota Gunungsitoli menjadi satu-satunya wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kondisi geografis yang relatif terisolasi menyebabkan tingginya biaya transportasi, terbatasnya konektivitas, dan rendahnya mobilitas barang dan jasa. Di dalam perspektif ekonomi wilayah, keterisolasian geografis menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena membatasi

akses terhadap pasar regional, infrastruktur, dan sumber daya manusia dan modal (Saputra Syam, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan (Aripin Salman, 2022) Berdasarkan Keppres No 131 Tahun 2015 mengenai penetapan wilayah tertinggal untuk periode 2015–2019, daerah terbelakang didefinisikan berdasarkan berbagai kriteria, yakni: perekonomian penduduk, SDM, sarana, daya finansial daerah, tingkat keterjangkauan, dan karakter wilayah.

Gambar 1.3 Penyebab Keteringgalan Kepulauan Nias



Sumber (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2024), diolah (2026))

Mengacu pada gambar 1.3, terlihat bahwasanya rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,083 tahun memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama, sehingga kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja masih terbatas. Meskipun harapan lama sekolah berada pada angka 13,24 tahun yang menggambarkan adanya peluang peningkatan pendidikan di masa depan, kesenjangan antara kondisi aktual dan harapan tersebut mengindikasikan belum optimalnya akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Di

dalam perspektif teori modal manusia, kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja yang selanjutnya menghambat daya saing wilayah.

Lalu perekonomian masyarakat menjadi faktor krusial yang memperkuat ketertinggalan daerah. Rendahnya pengeluaran per kapita mencapai Rp 11,1 juta mencerminkan terbatasnya daya beli dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut berkorelasi dengan tingginya tingkat kemiskinan, di mana 19,16% penduduk berada pada kategori miskin, sehingga sebagian besar masyarakat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di dalam pembangunan ekonomi regional, rendahnya pendapatan dan konsumsi melemahkan permintaan agregat, menghambat investasi lokal, dan membatasi penciptaan lapangan kerja, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitiannya (Zendrato & Lubis, 2024) yang menjabarkan bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Tingkat kemiskinan di Kab Nias dan Kab Nias Selatan. Peningkatan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan pekerjaan serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia menyebabkan kesejahteraan Masyarakat cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Faktor ketiga hal yang sama pentingnya ialah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar. Tingginya proporsi jalan rusak mencapai 62,31% menghambat mobilitas barang dan manusia, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan efisiensi aktivitas ekonomi. Di sisi lain, rendahnya akses terhadap sanitasi layak yang hanya mencapai 32,46% berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Ketid-

akmemadainya infrastruktur ini mencerminkan hambatan struktural dalam pembangunan wilayah, karena infrastruktur merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas hidup, kelancaran aktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Menurut (Kristiano et al., 2019) Pengembangan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi; namun, pembangunan ekonomi juga dapat memberi tekanan pada infrastruktur. Suatu daerah yang dianggap terpencil dapat ditingkatkan dengan infrastruktur yang juga memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat pedesaan. Pendekatan yang terencana dan sistematis terhadap pengembangan infrastruktur seharusnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Penyebab lain ketertinggalan suatu daerah berkaitan erat dengan karakteristik wilayah yang secara alamiah mempunyai tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana dan keterisolasian geografis. Proporsi daerah rawan longsor mencapai 38% dan daerah rawan tsunami mencapai 85,2% mengindikasikan bahwasanya sebagian besar wilayah ada dalam kondisi risiko lingkungan yang serius. Itu diperkuat dengan temuan penelitian (Aksa et al., 2024) Pulau Nias menghadapi ancaman tsunami yang signifikan akibat sejarah kejadian bencana serta kondisi geologisnya yang berada pada zona subduksi aktif. Kerawanan ini tidak hanya mengancam keselamatan penduduk, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian terhadap aktivitas ekonomi dan investasi, mengingat infrastruktur yang ada rentan rusak dan membutuhkan biaya mitigasi serta rehabilitasi yang besar. Kondisi tersebut, diperparah oleh isolasi geografis wilayah kepulauan, membatasi akses terhadap pasar, layanan publik, dan pusat

per-tumbuhan, sehingga memperlambat integrasi ekonomi dan memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Selain faktor fisik wilayah, keuangan daerah turut menjadi determinan penting dalam menjabarkan ketertinggalan. Rata-rata dana transfer mencapai Rp 926 miliar memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut mencerminkan rendahnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ruang fiskal untuk membiayai pembangunan strategis menjadi terbatas. Keterbatasan kapasitas keuangan ini berdampak pada rendahnya kualitas dan alokasi belanja publik, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal. Akibatnya, meskipun daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, pemanfaatannya dalam mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum optimal karena masih besarnya kebutuhan dasar dan kuatnya permasalahan struktural yang dihadapi.

Gambar 1.4 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Nias

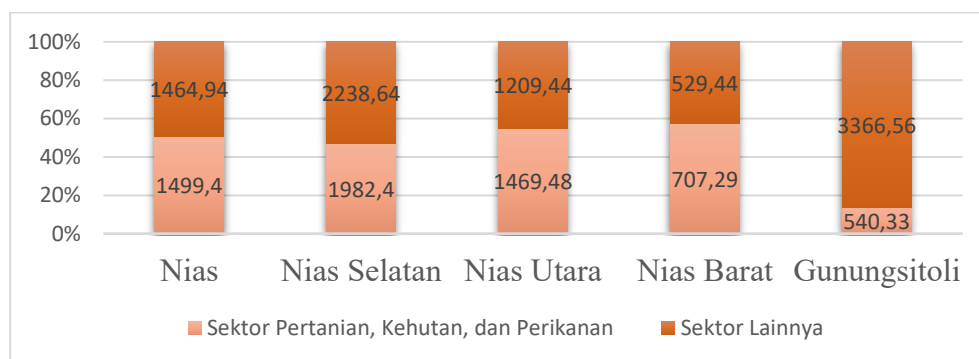


Sumber : (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2024)

Di tengah berbagai keterbatasan, Kepulauan Nias mempunyai potensi perekonomian yang besar namun belum dimaksimalkan dengan baik. Wilayah

yang terdiri dari 133 pulau, dengan 30 pulau berpenghuni, didukung oleh kekayaan SDA yang besar, terkhusus di bidang kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Karakteristik pesisir dan kepulauan memberikan keunggulan komparatif berupa tepi pantai yang luas, perairan laut kaya akan sumber ikan, dan kondisi agroklimat yang mendukung pengembangan komoditas seperti kelapa, karet, dan tanaman pangan. Lalu keindahan alam dan kekayaan budaya lokal menjadikan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif bagi kawasan ini.

Gambar 1.5 Kontribusi Sektor Terbesar di PDRB Kepulauan Nias Tahun 2024



Sumber : (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2024)

Mengacu pada grafik kontribusi PDRB tahun 2024 di Kepulauan Nias, terlihat bahwasanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama perekonomian di sebagian besar kabupaten, terutama di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Nilai kontribusi sektor primer ini relatif besar dan bahkan mendominasi struktur PDRB di wilayah kabupaten dengan kontribusi hampir 50% yang memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih begitu menggantungkan diri pada pemaksimalan SDA dan kegiatan ekonomi tradisional. Sebaliknya, Kota Gunungsitoli memperlihatkan struktur PDRB yang berbeda, di mana sektor lainnya (non-

pertanian) memberikan kontribusi melebihi sektor lainnya mulai dari pertanian, kehutanan, dan ikan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan transformasi ekonomi di Kepulauan Nias, dengan kota sebagai pusat jasa dan perdagangan, sementara kabupaten masih didominasi sektor primer, sehingga pembangunan ekonomi belum merata dan diversifikasi sektor bernilai tambah masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian (Eferli Halawa, 2023) Sektor unggulan diidentifikasi melalui analisis struktur pertumbuhan dan ti-pologi sektoral. Di Kabupaten Nias, sektor tani, hutan, dan perikanan jadi penopang utama melalui sumbangsuhnya dan pertumbuhan PDRB yang konsis-ten, sementara sektor lain seperti pertambangan, perdagangan, akomodasi dan makan minum, dan jasa pendidikan dan kesehatan turut berperan dengan kontribusi yang beragam. Penelitian Mangilaleng juga memperlihatkan bah-wasanya sektor penyediaan listrik dan gas, pembangunan, akomodasi serta penyajian makanan dan minuman, layanan keuangan dan asuransi, dan layanan kesehatan dan sosial mempunyai keunggulan komparatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

(Muljanto, 2021) mengidentifikasi beberapa sektor unggulan yang berperan strategis dalam perekonomian daerah, ditandai oleh pertumbuhan tinggi dan keunggulan komparatif dalam struktur ekonomi regional, meliputi sektor industri pengolahan, pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perdagangan dalam skala besar dan eceran, usaha pembangunan, dan penyediaan akomodasi dan layanan makan.

Mengacu pada ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya daya saing ekonomi di Kepulauan Nias, diperlukan pendekatan

pembangunan yang terarah dan berbasis pada potensi lokal. Pembangunan daerah tertinggal tidak dapat dilaksanakan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan struktur perekonomian yang dimilikinya. Di sini ini, identifikasi sektor unggulan menjadi penting karena berfungsi sebagai pendorong utama perkembangan ekonomi serta pembuka kesempatan kerja, dan menaikkan pendapatannya masyarakat melalui analisa yang komprehensif terhadap potensi dan kinerja sektoral secara berkelanjutan. Namun, kajian-kajian terdahulu umumnya hanya berfokus pada penentuan sektor unggulan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kinerja sektoral dan implikasinya terhadap upaya penanganan daerah tertinggal, khususnya pada wilayah kepulauan yang mempunyai keterbatasan aksesibilitas dan skala ekonomi seperti Kepulauan Nias.

Pendekatan ini selaras dengan teori ekonomi wilayah yang menekankan peran basis ekonomi dan spesialisasi sektoral sebagai strategi percepatan pembangunan, sehingga penelitian berjudul “Analisis Potensi dan Kinerja Sektor Unggulan dalam Upaya Penanganan Daerah Tertinggal di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara” menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana peran sektor unggulan dalam mendukung upaya penanganan daerah tertinggal di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh sektor unggulan dan sektor non unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui peran sektor unggulan dalam mendukung upaya penanganan daerah tertinggal di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh sektor unggulan dan sektor non unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitiannya ini dibatasi pada analisa potensi dan kinerja sektor-sektor ekonomi dalam rangka mengidentifikasi sektor unggulan serta menilai perannya dalam upaya penanganan daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Penelitian ini memfokuskan kajian pada sektor ekonomi penyusun PDRB Kepulauan Nias guna mengetahui sektor yang unggul dan kinerja pertumbuhan yang relatif lebih baik diperbandingkan wilayah acuan BPS menyediakan data sekunder untuk periode waktu tergantung pada ketersediaan data.

Analisa dilaksanakan pada tingkat wilayah Kepulauan Nias secara agregat tanpa membedakan secara rinci antar kabupaten/kota. Kajian ini menggunakan PDRB pada harga konstan yang dikelompokkan menurut lapangan usaha seri 2010 pada daerah di Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara dalam periode tahun 2015 hingga 2024. Selanjutnya, kajian ini juga membatasi kajian pada dampak sektor unggulan dan non-unggulan terhadap laju tumbuh kembang perekonomian daerah, tanpa membahas aspek sosial, politik, maupun lingkungan secara mendalam di luar indikator ekonomi yang digunakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Temuan dari kajian ini diupayakan akan diperoleh manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. **Manfaat Akademik:** Diupayakan perolehan dari kajian ini berkontribusi terhadap kemajuan ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi regional melalui penyediaan referensi empiris mengenai potensi dan kinerja sektor unggulan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penanganan daerah tertinggal. Lalu hasil penelitiannya ini diupayakan memperkaya kajian akademik terkait penerapan metode analisa ekonomi regional dalam mengidentifikasi sektor unggulan di wilayah kepulauan.
2. **Manfaat Praktis:** Diupayakan perolehan dari kajian ini bisa memberi cerminan komprehensif mengenai sektor ekonomi potensial dan unggulan di Kepulauan Nias yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan usaha, dan optimalisasi potensi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Manfaat bagi Pemerintah:** Bagi pemerintah daerah, hasil kajian ini diupayakan menjadi pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan, khususnya untuk penanganan daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Identifikasi sektor unggulan dan analisa kinerjanya dapat dijadikan dasar penentuan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan penyusunan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketertinggalan wilayah.